



7 Kabupaten/Kota Raih WTP LHP LKPD TA 2014 Pemprov Kalbar Raih WTP

Andika Lay
Harian Borneo, Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada 14 Kabupaten/Kota, dan dari jumlah LHP Kabupaten/Kota, terdapat 7 Kabupaten/Kota yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).



....Ke Halaman - 11 *Didi Budi Satrio*

LHP LKPD TA 2014 Pemprov Kalbar Raih WTP

LHP LKPD Provinsi Kalbar kembali meraih Opini WTP, sementara LHP LKPD Kabupaten/Kota yang meraih Opini WTP DPP diantaranya, Kota Pontianak dengan opini WTP DPP, Kabupaten Landak dengan opini WTP DPP, Kabupaten Sanggau dengan opini WTP DPP, Kabupaten Sintang dengan opini WTP DPP, Kabupaten Ketapang dengan opini WTP DPP, Kabupaten Sekadau dengan opini WTP DPP, dan Kabupaten Kubu Raya WTP DPP.

Sedangkan LHP LKPD Kabupaten/Kota yang meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian, diantaranya, Kabupaten Bengkayang dengan opini WDP, Kabupaten Sambas dengan opini WDP, Kabupaten Melawi dengan opini WDP, Kabupaten Kayong Utara dengan opini WDP, Kota Singkawang, dengan opini WDP, Kabupaten Kapuas Hulu dengan opini WDP, dan Kabupaten Mempawah

dengan opini WDP.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio memberikan selamat atas tiga entitas yang berhasil meningkatkan opininya dari WDP menjadi WTP DPP yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang.

"Pencapaian opini WTP DPP tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangan begitu juga dalam opini WDP. Permasalahan yang masih ditemui antara lain pengelolaan aset daerah yang belum memadai dan permasalahan sistem pengendalian intern seperti Pengelolaan PBB-P2 dan kesalahan penganggaran," kata Didi Budi Satrio.

Dikatakannya, permasalahan dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan antara lain terjadi di penyusunan HPS, kurang volume atas kegiatan, Belanja Penunjang Operasional (BPO) yang

belum dipertanggungjawabkan, dan pemahalan harga.

Selain itu, Kepala Perwakilan juga mengingatkan bahwa penyusunan LKPD mulai TA 2015 disusun berdasarkan basis akrual. Hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih mengingat kompleksitas laporan keuangan yang akan disusun. "Jadi pemerintah daerah mesti mempersiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak terkait kebijakan akuntansi. Hal ini penting karena terdapat risiko penurunan opini LKPD terhadap entitas yang kurang serius terhadap basis akrual.

"Penyerahan LHP ini sekaligus menutup seluruh rangkaian penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar. Opini yang diberikan untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 berupa 1 opini WTP, 7 opini WTP-DPP serta 7 opini WDP," ujarnya.